



**NOTA KESEPAHAMAN DAN KESEPAKATAN
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
KERJASAMA PEMERIKSAAN SWAB RT-PCR COVID 19
DIWILAYAH KOTA BANDA ACEH**

Nomor : 440/G126 /DK/2020

Nomor : b/222/UNH/HK 07.06/2020

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Kota Banda Aceh, kami bertanda tangan dibawah ini :

1. Lukman, SKM. M.Kes

: Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Kulu II Gampong Suka Ramai, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dalam hal ini mempunyai hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH.,FINASIM :

selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala** oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama **Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syiah Kuala** berkedudukan Jl. Teuku Tanoh Abee, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala Banda Aceh untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pemeriksaan RT-PCR untuk deteksi Covid-19 di Kota Banda Aceh, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memenuhi dan/atau memperoleh manfaat saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka kegiatan Kerjasama Swab Covid 19 di Kota Banda Aceh.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk saling mendukung dan memberi manfaat kepada PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kerjasama pemeriksaan swab RT-PCR untuk deteksi Covid 19 di Kota Banda Aceh.

--	--

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* Covid-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien atau orang yang terduga kontak erat kasus Covid-19.

PASAL 3
JANGKA WAKTU


Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai berlaku dari tanggal 19 Oktober 2020 s/d 10 Desember 2020 dan dapat diperpanjang kembali dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* Covid-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien dengan biaya sebesar **Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)** persampel sudah termasuk pajak untuk **5.000 pemeriksaan** terhadap semua sampel yang dikirim **PIHAK PERTAMA**. Penagihan biaya pemeriksaan akan **dibayarkan secara bertahap bila jumlah pemeriksaan telah mencapai 1000 pemeriksaan atau paling lambat tanggal 3 (tiga) disetiap bulannya** dengan permintaan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jumlah sampel yang diperiksa.
- (2) Untuk pengurusan surat Keterangan Bebas Pajak terkait COVID19 akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA** yaitu :
Nama Rekening : RPL 001 BLU UNSYIAH UTK DK
Nomor Rekening : 1056457166
Bank : Bank BRI Syariah

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima bukti hasil Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* Covid-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien atau orang yang terduga kontak erat kasus Covid-19 dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban melakukan pembayaran biaya Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* Covid-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien atau orang yang terduga kontak erat kasus Covid-19 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Ruang Lingkup sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 perjanjian ini.

	
---	---

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima pembayaran atas Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* Covid-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien atau orang yang terduga kontak erat kasus Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* Covid-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien atau orang yang terduga kontak erat kasus Covid-19 sesuai data yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menyampaikan Hasil Pemeriksaan *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* Covid-19 yang menggunakan spesimen Swab dari saluran pernafasan pasien atau orang yang terduga kontak erat kasus Covid-19 baik positif maupun negatif kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan tindakan selanjutnya.

PASAL 7



FORCE MAJEURE

- (1) Yang dianggap sebagai keadaan memaksa/force majeure adalah semua kejadian yang mempengaruhi pekerjaan dan pencegahannya diluar kemampuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka masing-masing pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain mengenai tanggal terjadinya force majeure dan penyebab terjadinya force majeure dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti layak atas terjadinya force majeure tersebut.
- (3) Apabila dalam 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Apabila keadaan memaksa disetujui maka perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut mengenai kelanjutan perjanjian yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian.
- (5) Apabila setelah force majeure terjadi, keadaan kembali normal, maka **PARA PIHAK** wajib untuk mengupayakan keadaan kembali seperti sebelum terjadinya force majeure, sehingga perjanjian ini dapat dilaksanakan.

PASAL 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. habisnya jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini tanpa ada perpanjangan dari **PARA PIHAK**;
 - b. atas persetujuan **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu perjanjian berakhir;
 - c. apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 perjanjian ini.

	
---	---

- (3) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, karena alasan apapun, maka pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai pengakhiran perjanjian tersebut kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan.
- (4) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian masih ada kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan tentang pelaksanaan perjanjian ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka akan di selesaikan melalui Pengadilan Negeri di Kota Banda Aceh.

PASAL 10

A D D E N D U M

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam perjanjian addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11

PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani setelah **PARA PIHAK** mengerti maksud dan isinya serta dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing dibubuhi materai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

